

PKS: Heru Budi Terkesan Ingin Hapus Jejak Anies di Jakarta

JAKARTA (IM) - PKS mengkritik Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. PKS menilai, kebijakan yang diambil oleh Heru terkesan ingin menghapus jejak Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

"Apa yang dilakukan Pj Gubernur DKI adalah kebijakan yang tidak substansi dan asal beda saja, terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan," kata Jubir PKS, Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Sejumlah kebijakan yang disorot antara lain ialah mencopot Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali hingga merubah slogan kota menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Iqbal memandang, semestinya slogan Jakarta Kota Kolaborasi tak perlu diubah. Dia lantas menyinggung masa jabatan Heru Budi yang hanya sebentar.

"Tidak perlu diubah, apalagi masa jabatan hanya satu tahun, terkesan Heru melakukan de-Aniesisasi," ucapnya.

Iqbal juga menyayangkan pergantian Sekda DKI yang merupakan tokoh Betawi profesional dan berpengalaman. Apalagi, kata dia, Marullah Matali adalah sosok yang dikenal ketokohnya dan tidak memiliki masalah maupun kasus.

"Sehingga pergantian yang dilakukan terkesan bagian dari upaya membersihkan loyalis gubernur sebelumnya," jelasnya.

Iqbal kemudian menyarankan sebaiknya Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono fokus kepada kerja-kerja substansi dibandingkan mengatak-atak pekerjaan yang sudah dilakukan Anies Baswedan.

"Apalagi ia adalah Gubernur yang ditunjuk, legitimasinya di hadapan masyarakat sangat lemah, harusnya Heru tahu tentang posisinya bahwa dia adalah Gubernur transisi," tegasnya.

"Dia tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan membuat kegaduhan," imbuhnya.

● yan

Tarif KRL Akan Naik Jadi Rp5.000, Begini Respons Penumpang

JAKARTA (IM) - Pemerintah merencanakan kenaikan tarif comutter line kereta rangkaian listrik (KRL) Jabodetabek menjadi Rp 5.000 per 25 kilometer pertama. Beberapa penumpang ada yang menolak dan setuju dengan wacana kenaikan tersebut.

Pengguna KRL, Ratna tidak setuju dengan kenaikan tarif. Dia meminta agar kenaikan itu dikaji ulang.

"Sebaiknya sih nggak usah naik ya, karena tahun depan itu kan kita belum tau ya, katanya mau ada krisis global. Jadi kalau menurut saya yang juga senang naik comutter line, sebaiknya nggak usah naik dulu deh, dilihat aja lagi atau di kaji lagi ya," kata Ratna saat dijumpai di Stasiun Bogor, Selasa (13/12).

"Sebenarnya pelayanan memang sudah baik ya, cuma fasilitas kaya toilet di Stasiun Bogor diperbaiki, di semua stasiun juga ya, fasilitas-fasilitasnya (diperbaiki)," tambah wanita asal Jakarta Selatan yang mengaku hampir setiap hari naik comutter line ke tempat bekerjanya di Kota Bogor.

Saran untuk menunda kenaikan tarif juga diungkap oleh pengguna KRL lainnya bernama Anggara. Pria asal Bogor ini meminta pihak PT. KAI meningkatkan pelayanan dan keamanan penumpang di dalam kereta.

"Kalau bisa (tarif) jangan naik dulu ya, pelayanan dulu deh ditingkatkan. Kalau bisa ditambah gerbongnya di jam-jam sibuk, biar nggak terlalu numpuk. Kalau nggak numpuk peluang pelaku kejahatan juga berkurang, kaya copet, yang suka peleccehan seksual itu, mereka

begitu karena berdesakan," kata Anggara warga Bogor.

Dukung Kenaikan Tarif

Sementara itu, pengguna KRL lain, Suryani Lestari menyebut, kenaikan tarif untuk ongkos comutter line dianggap wajar. Karena, fasilitas dan pelayanan untuk penumpang sudah membaik dari tahun ke tahun.

Warga Depok, Jawa Barat yang setiap hari bekerja di kawasan Sudirman itu meminta sistem transit di Stasiun Manggarai dihapus, dan dikembalikan seperti semula. Ia menganggap sistem transit hanya buang waktu dan menyulitkan penumpang lansia.

"Ya kalau soal kenaikan tarif wajarlah ya, karena sekarang apa-apa naik, tapi kalau bisa yang berhenti di Manggarai itu dihilangkan, dibalikin lagi kaya dulu, bisa langsung Sudirman atau Tanahabang. Lagian siapa sih itu yang ubah-ubah itu. Fasilitasnya sudah bagus, tapi dibikin ribet sama aturan mesti turun (transit) di Manggarai," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, tarif KRL Commuter Line diperkirakan akan mengalami kenaikan tahun depan. Tarif KRL diperkirakan naik jadi di kisaran Rp 5.000 untuk 25 Km pertama dan untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap di angka Rp 1.000.

Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Plt Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal. Bahkan Rizal menyatakan sejetinya sudah ada Peraturan Menteri yang diteken soal kenaikan tarif KRL. ● yan

Wali Kota Depok Buka Suara soal SDN Pocin 1, Ini Penjelasannya

DEPOK (IM) - Terkait kirsuh relokasi yang terjadi di SDN Pondok Cina 1, Wali Kota Depok, Mohammad Idris pun akhirnya angkat bicara. Dirinya berjanji akan penuhi permintaan orangtua siswa dengan memberikan gedung sendiri untuk SDN Pocin 1.

Pihak Pemkot Depok pun akan memenuhi permintaan orangtua siswa terkait gedung sendiri untuk SDN Pocin 1. Namun, selama proses pembangunan ruang kelas baru, Pemkot Depok akan melakukan pemindahan sementara siswa ke dua sekolah yang lokasinya tidak jauh dari SDN Pondok Cina 1, yakni SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.

Nantinya, pada tahun ajaran baru pihak Pemkot Depok berjanji bahwa para siswa SDN Pocin 1 yang telah belajar sementara di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 akan dibuatkan ruang kelas baru atau RKB di gedung SDN Pondok Cina 5. Pada tahun depan, Pemkot Depok pun akan

melakukan penggabungan terhadap SDN Pondok Cina 5 di mana kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di gedung Pondok Cina 3. Sementara, gedung Pondok Cina 5 diganti untuk SDN Pondok Cina 1.

"Rencana kita SDN 1 namanya tetap nanti, cuma sudah keburu enggak sabaran. Jadi kita tempatkan dulu ke tempat yang ada, tahun depan baru kita tempatkan anak-anak SDN 1 ke SDN 5, namanya tetap SDN 5. SDN 5 dilebur ke SDN 3," katanya, Selasa (13/12).

Sedangkan, untuk gedung sekolah baru akan diperuntukkan bagi SMPN baru yang akan memfasilitasi warga Pondok Cina dan sekitarnya, di mana sampai saat ini belum ada SMPN Negeri di wilayah ini.

Nantinya, Wali Kota Depok akan mengundang komite SDN Pondok Cina 1 dan para wali murid untuk mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan oleh mereka masih tetap bertahan belajar di SDN Pondok Cina 1. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



HUT KE-85 LKBN ANTARA
Direktur Utama Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat (kanan) memberikan cenderamata kepada Direktur Utama Nindya Karya Haedar A Karim saat perayaan HUT ke-85 LKBN Antara di Jakarta, Selasa (13/12). Perayaan Hari Ulang Tahun ke-85 Antara mengusung tema "Menyentuh Nusantara Menyentuh Pertiwi".

Pengamat Sebut Heru Cari Panggung dengan Mengganti Slogan Anies

Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI saat ini menunjukkan kelemahan utama setiap pemerintah daerah yang kerap membuat kebijakan fiktif. "Kebijakan fiktif ini lebih kepada untuk nyari panggung, ini kan gak bagus," kata Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul.

JAKARTA (IM) - Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul mengkritik perubahan slogan Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono menjadi 'Sukses Jakarta Untuk Indonesia'. Menurutnya, langkah yang diambil dari Pemerintah Provinsi DKI ini menunjukkan kelemahan utama setiap pemerintah daerah yang kerap membuat kebijakan fiktif.

"Kebijakan fiktif ini lebih kepada untuk nyari panggung, ini kan gak bagus," kata Adib ketika dikonfirmasi, Selasa (13/12).

Dia menambahkan, ihwal mengganti nama atau slogan hingga rotasi pejabat yang dekat dengan Anies, akan lebih baik jika Heru melanjutkan ke-

bijakan strategis. Selama Anies menjabat, Adib menyebut ada beberapa program yang sebaiknya bisa dilanjutkan.

"Kalau warisan Anies baik ya lanjutkan, kalau jelek ya tinggalkan. Dulu Anies juga saya kritik soal ganti slogan rumah sakit jadi rumah sehat untuk Jakarta," tegas Direktur Eksekutif Kebijakan Politik Nasional (KPN) itu.

Adib menyarankan, agar Heru bisa berfokus pada tugasnya di Jakarta. Selain beberapa tugas yang diberikan Presiden, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) lapangan pekerjaan hingga pelayanan investor harusnya bisa difokuskan. "Itu yang harusnya dikerjakan," ujarnya. Dia menambahkan, apa

yang dilakukan Heru selama dua bulan terakhir hanya melakukan dendam politik. Tak ayal, kata dia, banyak masyarakat yang meragukan dan menilai apa yang dilakukan Heru hanya demi kepentingan politik. "Benar anggapan publik karena disinggung dengan pusat," katanya.

Oleh sebab itu, kinerja Heru dalam dua bulan terakhir yang merotasi dan mengganti pejabat yang dekat dengan Anies disayangkan Adib. Pasalnya, Heru sebagai representasi dari Istana seharusnya bisa menjalankan tupoksi Pemda DKI dengan memanfaatkan monitoring alih-alih persaingan politik.

Berbeda dengan Adib, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengaku jika slogan yang baru akan diresmikan Heru adalah langkah tepat. Pasalnya, slogan lama DKI 'Kota Kolaborasi' dinilai dia kerap disalahartikan oleh warga maupun investor bahwa Pemprov DKI sedang kesulitan dana.

"Cocok dan tepat sekali. Kolaborasi sering disalahartikan DKI kesulitan keuangan, padahal pemakaian APBD

justru belum terserap dengan baik dan sesuai prioritas," kata August.

Dia menyebut, slogan baru 'Sukses Jakarta untuk Indonesia' merupakan tantangan positif bukan hanya bagi Pemda DKI dan ASN tetapi juga warga secara keseluruhan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dipastikan untuk menempatkan slogan baru bertajuk 'Sukses Jakarta Untuk Indonesia' di dekat logo Plus Jakarta. Tujuan dari dibuatnya slogan tersebut, untuk mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Namun demikian, logo tersebut masih menunggu surat keputusan (SK) dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI, Raides Aryanto, mengatakan, penyangkapan logo baru dengan Jakarta Plus itu, diharapkan bisa

mendukung warga DKI untuk menynergikan perpindahan ibu kota.

"Serta sebagai bagian dari pelaksanaan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD)" kata Raides dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/12).

Namun demikian, Raides menegaskan, pihaknya tidak akan mengganti logo +Jakarta. Dijelaskan dia, semangat logo lama akan berlanjut dalam RPD 2023-2026 yang sudah ditetapkan.

Menurut dia, logo dan semangat yang ada dalam kata 'Kolaborasi' tetap diarahkan dalam beberapa isu strategis di banyak program.

Diketahui, Jakarta sebelumnya mempunyai slogan 'Kota Kolaborasi' yang dicanangkan mantan Gubernur Anies Baswedan. Slogan itu, terus digunakan Anies hingga munculnya isu slogan baru di DKI 'Sukses Jakarta untuk Indonesia' yang ramai diperbincangkan di media sosial. ● yan

Kepgub Heru Atur Soal Batas Usia PJLP Maksimal 56 Tahun, Timbulkan Keresahan

JAKARTA (IM) - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroit peraturan baru soal batas usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang kini maksimal 56 tahun. Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kepgub tersebut diteken Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pada 11 November 2022. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono berujar, Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 ini diterbitkan tanpa sosialisasi yang maksimal.

"Tentunya (terbitnya Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022) menimbulkan keresahan dan keberatan dari PJLP yang berusia 56 tahun," sebutnya kepada awak media, Selasa (13/11). "Meningkat akan sulit bagi kelompok usia tersebut untuk mencari pekerjaan di tempat lain," sambung dia.

Mujiyono merekomendasikan agar Heru Budi menyisipkan satu poin tambahan dalam Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022. Poin tambahan ini menyatakan bahwa usai dievaluasi, kontrak kerja PJLP yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pekerjaannya dapat diperpanjang. Kemudian Mujiyono juga menyarankan agar penerapan Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 ditunda hingga tahun depan. Hal ini diterapkan agar PJLP yang mepet berusia 56 tahun bisa segera mencari pekerjaan di tempat lain.

Komisi A merekomendasikan agar ada penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa PJLP yang melewati usia 56 tahun,

namun berdasarkan evaluasi kinerja masih memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, maka terhadap PJLP tersebut dapat dicekualikan," urainya.

"Selain itu, perlu adanya penundaan pemberlakuan ketentuan tersebut, misalnya satu tahun kedepan untuk memberikan kesempatan kepada PJLP terkait mencari pekerjaan di tempat lainnya," sambung Mujiyono.

Diberitakan sebelumnya, Heru Budi kini hanya mempekerjakan pegawai PJLP berusia maksimal 56 tahun. Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 ini tak hanya mengatur batas maksimal usia PJLP. Kepgub itu juga mengatur batas minimal usia PJLP, yakni 18 tahun.

"PJLP berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun," demikian yang tertulis dalam Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 itu. Untuk diketahui, tercantum dalam Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022, PJLP adalah orang perorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, kecuali pendidik, tenaga kependidikan, dan PJLP pada BLUD.

Beberapa posisi yang diisi oleh PJLP adalah pasukan oranye hingga biru yang ada tiap kelurahan di Jakarta. Sementara itu, berdasarkan aturan yang sama, pengadaan PJLP dilaksanakan berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga PJLP yang ditetapkan berdasarkan analisis jenis pekerjaan, beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan. ● yan

Ada Laporan dari Masyarakat, Dani Ramdan Sidak TPA Burangkeng

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (dua kiri) saat memeriksa kondisi TPA Burangkeng, Senin (12/12) yang sampahnya kembali longsor sejak Jumat (9/12) lalu.

SETU (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, memeriksa langsung kondisi TPA Burangkeng, Setu, yang sampahnya kembali longsor sejak Jumat, 9 Desember 2022 lalu. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya penyempitan jalan dan antrian panjang bagi truk sampah yang akan memasuki TPA Burangkeng.

"Ada laporan dari masyarakat bahwa sudah berhari-hari antrian truk sampah cukup panjang, makanya saya periksa dan ternyata dari hari Jumat ada longsor sehingga menutup jalan," ucap Pj. Bupati kepada wartawan di TPA Burangkeng, Setu, Senin (12/12).

Ia menilai bahwa TPA Burangkeng merupakan tempat yang rawan mengalami

longsor, karena terus didatangi oleh truk sampah mulai dari pagi hingga malam setiap harinya. Apabila longsor terjadi, maka dapat mengakibatkan terhentainya aktivitas pendistribusian sampah dari truk pengangkut.

"Kondisinya satu titik ini rawan sekali. Jika sudah terhenti karena longsor maka bisa berhenti, padahal truk datang terus setiap hari dari pagi sampai malam," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (13/12).

Dengan terjadinya longsor tersebut, Pemkab Bekasi langsung mengambil tindakan melalui pengangkatan sampah yang menutupi jalan menggunakan alat berat. Diharapkan truk sampah yang telah mengantri sejak Jumat lalu dapat segera mendistribusikan sampahnya ke dalam TPA Burangkeng.

"Ini sudah jalan lagi. Masih tersisa sekitar 30 truk, mudah-mudahan jam delapan malam ini selesai," ujarnya. ● mdl

UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	
Dengan ini kami mengundang seluruh pemegang saham PT. TIPS INOVASI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada:	
Hari/Tanggal	: Rabu, 28 Desember 2022
Pukul	: 10.00-selesai
Tempat	: Jalan Bungur Besar Raya 55 No. 2D, Jakarta 10620
Agenda Rapat	: 1. Persetujuan Pembubaran Perseroan. 2. Persetujuan Penunjukan Likuidator. 3. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
Besarnya harapan kami agar bapak/ibu dapat menghadiri rapat tersebut. Apabila bapak/ibu berhalangan, kiranya dapat memberikan surat kuasa kepada pihak lain yang dapat menghadiri rapat tersebut. Materi rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal surat ini hingga tanggal rapat diselenggarakan.	
Jakarta, 14 Desember 2022 Direksi PT. TIPS INOVASI INDONESIA	